Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

TRIWULAN I
2019

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2019

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Dalam laporan juga disampaikan beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya,

Pada periode Triwulan I Tahun 2019, persentase realisasi penyerapan terhadap target mencapai 21,2 persen. Nilai ini lebih tinggi 6,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 14,7 persen, dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan satu, yaitu sebesar 13,6 persen. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan I Tahun 2019, terdapat 24 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penarikan pinjaman. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya kinerja proyek, antara lain permasalahan pembebasan lahan, pengadaan barang/jasa, kinerja kontraktor yang buruk, dan adanya gangguan cuaca yang ekstrim.

Pembelajaran (*lesson learned*) pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang dicantumkan dalam laporan ini, antara lain dari *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)* pada Kemenag, yang memberikan pembelajaran tentang pentingnya kualitas dan kapasitas PMU sebagai pengelola proyek, dan perlunya standar yang sama terkait *procurement guidelines* antara PMU dan *Lender*. Pada proyek Patimban *Port Development Project* di Kemenhub, didapatkan pembelajaran mengenai pentingnya kemampuan dan inovasi pengelola proyek (PMU) dalam pemilihan alternatif penyelesaian permasalahan proyek termasuk melakukan koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait.

Untuk memastikan manfaat proyek serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya. Sedangkan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DAFTAR ISTILAH

ADB	:	*Asian Development Bank*
AFD	:	*Agence Francaise de Development*
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
EU	:	*European Union*
IsDB	:	*Islamic Development Bank*
IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
JBIC	:	*Japan Bank for International Cooperation*
JICA	:	*Japan International Cooperation Agency*
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemennaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kemen ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
Kemen PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
KSA	:	Kreditor Swasta Asing
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	:	Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah
PT. PII	:	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. Pertamina	:	PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PT. PLN	:	PT. Perusahaan Listrik Negara
PT. SMI	:	PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) pada akhir Triwulan I Tahun 2019 (posisi 31 Maret 2019) adalah sebesar ekuivalen USD 17.046,3 juta, yang terdiri dari 145 proyek dan dilaksanakan oleh 16 Kementerian/Lembaga, 3 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami penurunan sebesar USD 861,8 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan nilai pinjaman ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang telah selesai (*closing*). Sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah sebesar USD 7.085,2 juta. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 adalah USD 485,1 juta atau mencapai 21,2 persen dari target 2019 sebesar USD 2.284,8 juta. Persentase penyerapan ini meningkat sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 14,7 persen, dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata penyerapan lima tahun terakhir pada triwulan satu, yaitu sebesar 13,6 persen. Meskipun demikian, masih terdapat cukup banyak proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (penyerapan nol).

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kinerja proyek, diantaranya adalah adanya gangguan cuaca yang ekstrim, rendahnya kinerja kontraktor, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Dalam laporan ini juga disampaikan pembelajaran (*lesson learned*) dari proyek yang masih berjalan, dan uraian kinerja pelaksanaan dari beberapa proyek hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan.

PINJAMAN LUAR NEGERI

1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2019

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya berdasarkan pengelompokkan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2019, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2018.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwukan I Tahun 2019 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

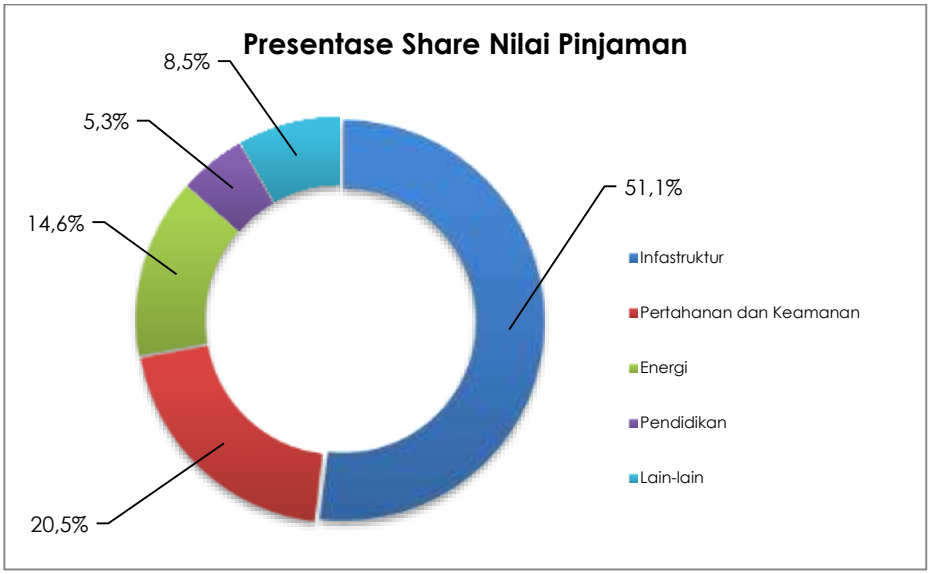

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sebesar 65,7 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung konektivitas nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, melalui pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2018), terdapat penurunan kompoisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan walaupun tidak signifikan, yaitu dari 22,0 persen menjadi 20,5 persen. Penurunan komposisi pinjaman juga terjadi di sektor energi, yaitu dari 17,0 persen turun menjadi 14,6 persen. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor pendidikan juga mengalami penurunan dari 6,0 persen menjadi 5,3 persen. Peningkatan komposisi pinjaman terjadi di sektor infrastruktur yang mengalami kenaikan signifikan dari 49,0 persen menjadi 51,1 persen. Sektor lain-lain juga mengalami peningkatan komposisi pinjaman, yaitu dari 6,0 persen menjadi 8,5 persen. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2019		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infastruktur	41	8.712,5	2.876,3	33,0	5.836,2	1.184,7	221,9	18,7
Energi	16	2.482,2	1.144,7	46,1	1.337,6	222,1	24,9	11,2
Pendidikan	9	910,8	401,9	44,1	509,0	80,1	27,8	34,7
Lain-lain	14	1.440,2	690,9	48,0	749,6	88,9	9,2	10,3
Pertahanan dan Keamanan	65	3.500,5	1.971,4	56,3	1.529,1	709,0	201,4	28,4
Total	**145**	**17.046,3**	**7.085,2**	**41,6**	**9.961,3**	**2.284,8**	**485,1**	**21,2**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018, yaitu meningkat dari 14,7 persen menjadi 21,2 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, beberapa sektor pada triwulan pertama 2019 mengalami penurunan maupun peningkatan nilai penyerapan yang cukup signifikan dibandingkan dengan peride yang sama pada tahun lalu. Antara lain sektor energi, yang mengalami penurunan kinerja penyerapan cukup signifikan, yaitu dari nilai penyerapan 17,4 persen menjadi 11,2 persen. Kinerja di sektor lain-lain juga mengalami penurunan nilai penyerapan, yaitu dari 20,9 persen pada Triwulan I Tahun 2018, menjadi hanya 10,3 persen pada triwulan ini. Namun, sektor pertahanan dan keamanan, mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang sangat signifikan dari 13,8 persen menjadi 28,4 persen. Peningkatan yang signifikan juga terjadi pada sektor pendidikan dan infrastruktur, yaitu sektor pendidikan mengalami peningkatan nilai penyerapan dari 2,2 persen menjadi 34,7 persen, dan sektor infrastruktur mengalami peningkatan dari 16,4 persen pada triwulan yang sama di tahun lalu menjadi 18,7 persen pada triwulan ini.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab dapat dilihat dalam gambar 2.2. Proporsi terbesar masih berada di Kemen PUPR, Kemenhan, dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kemen PUPR dari 31,3 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi 32,3 persen pada triwulan ini. Penurunan komposisi nilai pinjaman terjadi di Kemenhan yang mengalami penurunan dari 20,1 persen pada Triwulan I Tahun 2018 menjadi 17,6 persen pada triwulan ini. PT. PLN juga mengalami penurunan komposisi pinjaman, yaitu dari 13,9 persen pada periode yang sama tahun lalu menjadi 13,1 persen pada triwulan ini.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

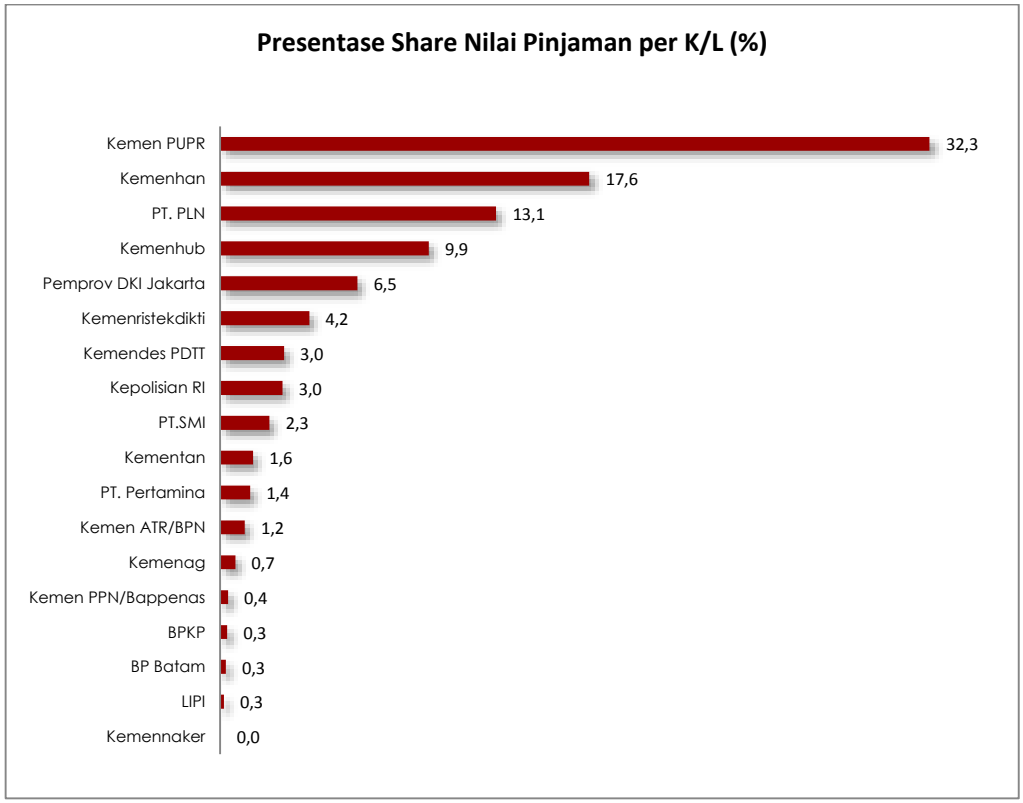

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Apabila dilihat dari nilai pinjaman, maka berdasarkan Tabel 2.2 terdapat penurunan nilai pinjaman yang tidak cukup signifikan dari Triwulan I Tahun 2018 ke Triwulan I Tahun 2019, yaitu sebesar USD 861,8 juta. Perubahan nilai pinjaman yang terjadi pada Kepolisian RI yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar USD 195,0 juta, dan PT. SMI juga mengalami kenaikan nilai pinjaman sebesar USD 100,0 juta.

Sedangkan Kemenhan mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 638,9 juta. Demikian juga dengan Kemenristekdikti yang mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 193,9 juta, dan PT.PLN yang mengalami penurunan nilai pinjaman sebesar USD 280,0 juta. Perubahan nilai pinjaman juga terjadi pada Kemen PUPR yang turun sebesar USD 159,7 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*), dan adanya proyek-proyek yang baru efektif.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2019		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	**125**	**13.050,5**	**5.017,8**	**38,4**	**8.033,0**	**1.857,0**	**425,9**	**22,9**
BMKG	2	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
BPKP	1	57,8	56,8	98,4	0,9	0,7	0,0	0,0
BP Batam	1	47,0	18,6	39,6	28,4	13,6	0,9	6,3
Kemenag	1	123,8	14,3	11,6	109,5	7,1	6,9	96,5
Kemendes PDTT	2	518,1	460,9	89,0	57,2	54,9	0,8	1,4
Kemennaker	1	2,5	1,9	76,0	0,6	0,6	0,4	64,3
Kemen PUPR	32	5.505,3	1.456,4	26,5	4.048,9	614,3	139,3	22,7
Kemenhub	5	1.693,6	497,1	29,4	1.196,5	364,6	48,2	13,2
Kemenkes	1	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Kementan	4	267,5	131,5	49,2	136,2	11,1	5,3	47,6
Kemen ATR/BPN	1	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Kemen PPN/ Bappenas	1	63,9	36,2	56,8	27,6	9,1	0,0	0,0
Kemenristekdikti	7	723,2	351,3	48,6	371,8	63,8	20,9	32,7
Kepolisian RI	18	506,1	126,1	24,9	380,0	89,5	24,5	27,4
Kemenhan	47	2.994,4	1.845,3	61,6	1.149,1	619,5	176,9	28,6
LIPI	1	47,4	21,2	44,7	26,2	8,0	1,9	23,1
Diteruspinjamkan (SLA)	**18**	**2.882,2**	**1.188,6**	**41,2**	**1693,6**	**284,4**	**45,6**	**16,0**
PT. PERTAMINA	1	243,4	89,2	36,7	154,2	57,1	4,9	8,5
PT. PLN	15	2.238,8	1.055,5	47,1	1.183,4	164,9	20,0	12,1
PT. SMI	2	400,0	43,9	11,0	356,1	62,4	20,8	33,3
Diterushibahkan	**2**	**1.113,5**	**878,8**	**78,9**	**234,7**	**143,4**	**13,6**	**9,5**
Pemprov DKI Jakarta	2	1.113,5	878,8	78,9	234,7	143,4	13,6	9,5
Total	**145**	**17.046,3**	**7.085,2**	**41,6**	**9.961,3**	**2.284,8**	**485,1**	**21,2**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement* atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan I Tahun 2018), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan pada triwulan ini, yaitu Kemenag, Kemennaker, Kemen PUPR, Kementan, Kemenristekdikti, Kepolisian RI, Kemenhan, LIPI, dan PT. SMI. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi yang memiliki kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 17,5 persen pada Triwulan I Tahun 2019, dan mengalami peningkatan kinerja penyerapan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain terjadi peningkatan kinerja penyerapan pada beberapa instansi, pada triwulan ini juga masih terdapat cukup banyak instansi penanggungjawab yang belum melakukan penyerapan, sehingga tingkat penyerapannya masih sama atau bahkan belum melakukan penyerapan (nol).

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Sumber pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Kreditor Bilateral, Kreditor Multilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Hongaria, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong.

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

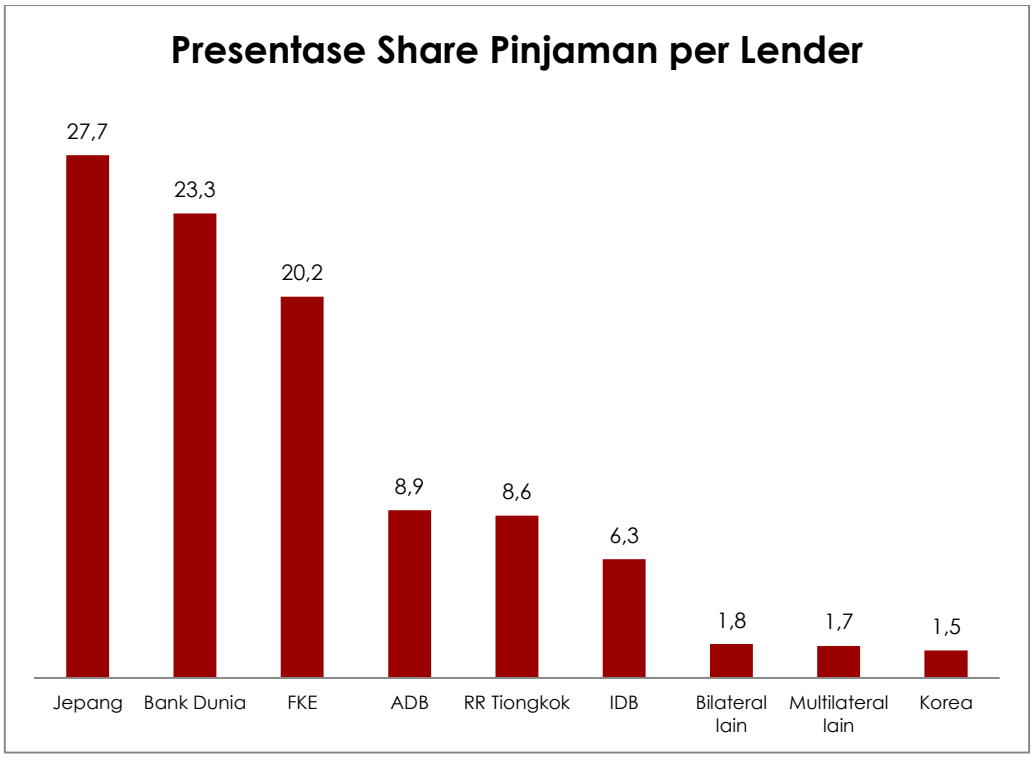

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Keterangan:
- *Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund*
- *Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Hongaria, Jerman, Perancis, dan Spanyol*

Sekitar hampir 71,2 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2018), terdapat perubahan yaitu meningkatnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 18,5 persen pada Triwulan I Tahun 2018 menjadi 23,3 persen pada triwulan ini. Komposisi pinjaman Multilateral Lain dan Bilateral Lain juga mengalami sedikit peningkatan, komposisi pinjaman Multilateral Lain meningkat dari 1,6 persen menjadi 1,7 persen,

komposisi pinjaman Bilateral Lain meningkat dari 1,4 persen menjadi 1,8 persen, dan komposisi pinjaman Korea meningkat dari 1,3 persen menjadi 1,5 persen. Adapun penurunan komposisi pinjaman terjadi pada komposisi pinjaman RR Tiongkok dari 8,8 persen turun menjadi 8,6 persen. Komposisi pinjaman ADB dari 9,4 persen turun menjadi 8,9 persen, dan komposisi pinjaman IDB turun dari 7,6 persen menjadi 6,3 persen. Komposisi ponjaman FKE pun mengalami penurunan dari 21,7 persen menjadi 20,2 persen. Sedangkan penurunan komposisi pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada komposisi pinjaman Jepang yang turun dari 29,5 persen menjadi 27,7 persen.

Dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2018, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami perubahan yang signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 17.046,3 juta mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar USD 2.417,3 juta dari triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang sudah selesai (*closing*), sehingga beberapa pemberi pinjaman mengalami penurunan nilai pinjaman. Penurunan nilai pinjaman yang cukup signifikan dari triwulan lalu terjadi pada sumber pinjaman Jepang dari Kreditor Bilateral yang turun sebesar USD 412,3 juta dari USD 5.136,6 juta menjadi USD 4.724,3 juta. Penurunan terjadi pula di sumber pinjaman dari Kreditor Multilateral, yaitu ADB turun sebesar USD 180,0 juta dari USD 1.697,6 juta menjadi USD 1.517,6 juta, dan Bank Dunia turun sebesar USD 878,1 juta dari USD 4.844,7 juta menjadi USD 3.966,6 juta.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah *Loan*	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2019	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
						Target	Realisasi	%
I	**Kreditor Multilateral**	**49**	**6.848,9**	**2.334,9**	**4.514,3**	**637,9**	**151,9**	**23,8**
	Bank Dunia	19	3.966,6	1.428,9	2.537,7	404,5	106,7	26,4
	ADB	13	1.517,6	346,1	1.171,4	132,2	14,7	11,1
	IDB	12	1.074,2	426,6	647,6	89,3	29,6	33,2
	IFAD	4	255,6	115,3	140,6	11,1	1,0	8,6
	Saudi Fund	1	35,0	17,9	17,1	0,8	0,0	0,0
II	**Kreditor Bilateral**	**41**	**6.751,7**	**2.801,8**	**3.949,9**	**938,6**	**131,8**	**14,0**
	Jepang	24	4.724,3	1.759,3	2.965,0	666,7	39,8	6,0
	Hongaria	1	36,4	20,8	15,6	0,0	0,0	0,0
	Jerman	2	121,5	17,5	104,0	51,8	1,8	3,5
	Perancis+AFD	2	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Korea	4	250,4	102,6	147,7	32,3	0,9	2,7
	RR Tiongkok	8	1.469,1	901,6	567,5	187,8	89,4	47,6
III	**KSA/LPKE**	**64**	**3.445,7**	**1.948,5**	**1.497,2**	**708,3**	**201,4**	**28,4**
	TOTAL	**154**	**17.046,3**	**7.085,2**	**9.961,3**	**2.284,8**	**485,1**	**21,2**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2019 yang mencapai 21,2 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 28,4 persen, Kreditor Bilateral sebesar 14,0 persen dan Kreditor Multilateral sebesar 23,8 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek dari sumber pinjaman IDB dan Bank Dunia, yang masing-masing mencapai 33,2 persen dan 26,4 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek dari sumber pinjaman RR Tiongkok dan Jepang, yaitu masing-masing mencapai 47,6 persen dan 6,0 persen.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN I TAHUN 2019

Pada tabel 2.4 berikut ini dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk kedalam pemantauan triwulanan.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan I Tahun 2019

(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	Indonesia Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program	Kemenkes	Bank Dunia	150,0
2	Development of Maritime Meteorological Information System (MMS)	BMKG	AFD	71,1
3	Scaling-Up BMKG Climate and Weather Service Capacity (SUS)	BMKG	Perancis (Natixis)	78,9
4	Engineering Services for Multipurpose Dams, Rivers, and Coastal	Kemen PUPR	Korea	31,7
TOTAL				**331,7**

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2019

Berdasarkan target penyerapan tahun 2019, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai **21,2** persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami peningkatan sebesar **6,5** persen. Peningkatan realisasi penyerapan yang sangat signifikan terjadi pada proyek-proyek Kreditor Multilateral, sedangkan realisasi penyerapan untuk proyek-proyek dari Kreditor Bilateral cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian, capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat **24** proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, yaitu mampu mencapai realisasi penyerapan diatas 17,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat pula beberapa proyek yang belum melakukan penyerapan atau bahkan tidak mengalami pergerakan sejak mulai efektif sampai dengan Triwulan I Tahun 2019.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan Triwulan I Tahun 2019 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek

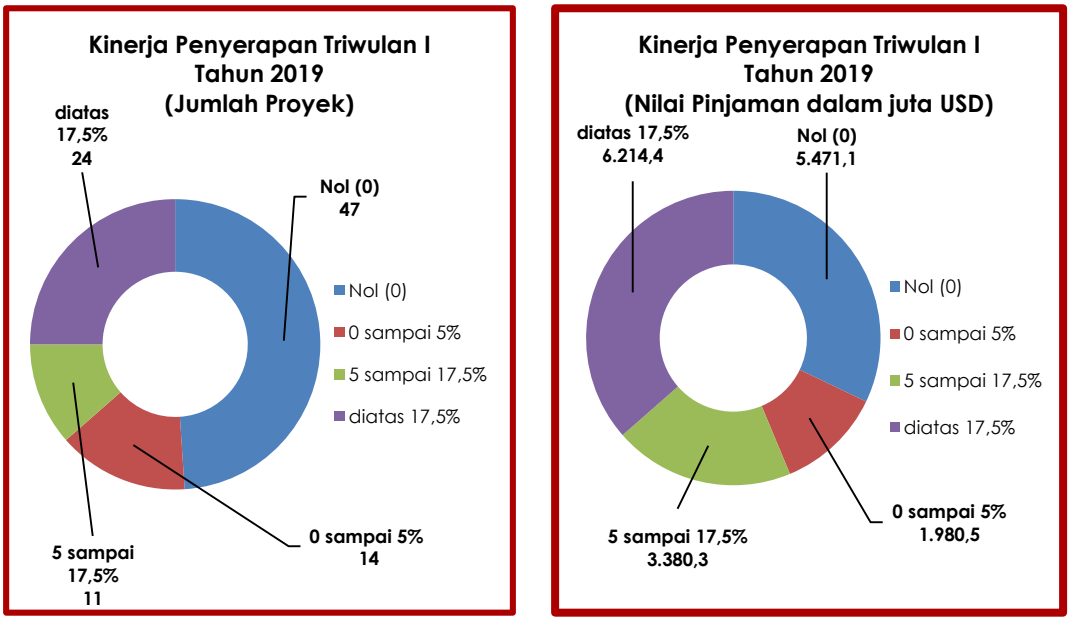

Sumber: *Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2019 (diolah)*

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 24 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penyerapan tahun 2019. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 24 proyek tersebut bernilai USD 6.214,4 juta atau 36,5 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 17.046,3 juta. Sekitar 61 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 5 persen terhadap target tahun 2019. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan sejak proyek dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap proyek-proyek tersebut karena nilainya mencapai USD 5.471,1 juta atau 32,1 persen dari total nilai pinjaman.

Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses reviu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application* (WA) dan keterlambatan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi. Permasalahan lainnya yang saat ini mulai sering dilaporkan adalah rendahnya kinerja kontraktor yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek, disamping masalah terkait lainnya seperti kekurangan tenaga kerja, material dan peralatan berat, serta kendala cuaca ekstrem dan kondisi geologi *site project*.

3. *LESSON LEARNED* PELAKSANAAN PROYEK

Pada Triwulan I Tahun 2019 ini terdapat beberapa proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Dalam laporan ini, dipaparkan 2 (dua) contoh proyek. Proyek-proyek tersebut adalah proyek yang sedang berjalan tetapi dengan waktu terpakai yang berbeda, yaitu *The Support to The Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)* yang dikelola oleh Kemenag, dan *Patimban Port Development Project* yang dikelola oleh Kemenhub.

The Support to The Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)

Proyek dukungan untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia ini melibatkan empat Institut Agama Islam Nasional (IAIN), yaitu IAIN Sumatera Utara (Medan, Sumatera Utara), IAIN Raden Fatah (Palembang, Sumatera Selatan), IAIN Walisongo (Semarang, Jawa Tengah), dan IAIN Mataram (Mataram, Nusa Tenggara Barat).

Proyek ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas Lembaga PTI melalui peningkatan dan pengadaan fasilitas serta pengembangan kurikulum dan pelatihan staf pengajar di keempat IAIN tersebut. Proyek ini juga sesuai dengan visi IDB dan strategi pemberantasan kemiskinan dan pengembangan SDM komprehensif IDB. *The support to The Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)* merupakan bagian dari Pilar Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (*Member Country Partnership Strategy* 2011-2015) untuk Indonesia, dan berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas Lembaga Pendidikan Tinggi dengan meningkatkan struktur dan peralatan, serta pengembangan kurikulum dan keterampilan. Proyek ini juga dinilai relevan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia untuk tahun 2010-2014 dengan tujuh pilar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan produktivitas.

The Support to The Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1) diharapkan dapat memperluas akses ke lembaga pendidikan dengan membangun gedung-gedung baru dan prasarana pendukungnya, seperti jalan, drainase, sambungan listrik, dan sebagainya. Proyek ini juga mendukung kualitas dan relevansi IAIN melalui berbagai aktivitas seperti pengembangan kurikulum program pelatihan dan pengadaan peralatan yang diperlukan dan sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Tabel 2.5 Data Umum Proyek *The Support to The Development of Islamic Higher Education (4 in 1)*

Nama Proyek	***The Support to The Development of Islamic Higher Education (4 in 1)***
Instansi Pelaksana	**a) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemenag** **b) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan** **c) Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang** **d) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang** **e) Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram**
Sumber Pembiayaan	**Pinjaman IDB senilai USD 123.750.000**
Masa Berlaku	**18 Mei 2013 – 11 Maret 2020**

Pelaksanaan proyek *The Support to The Development of Islamic Higher Education* mengalami keterlambatan yang serius, sehingga memerlukan perpanjangan masa laku pinjaman. Namun di periode kedua ini, pelaksanaan proyek masih dilaporkan mengalami beberapa permasalahan, yaitu:

1) Pekerjaan Sipil/*Civil work*
   Dalam DIPA 2019 tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan *furniture* dan *supporting infrastructure*. Sebenarnya kebutuhan tersebut sudah diusulkan pada saat pembahasan pagu indikatif, tetapi tidak dipenuhi karena dikhawatirkan tidak terserap. Kebutuhan meubelair dan infrastruktur penunjang sangat dibutuhkan terutama untuk UIN Semarang dan UIN Mataram yang diperkirakan akan selesai pembangunan fisiknya pada akhir 2019.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini sudah dilakukan beberapa kali konsultasi dengan Biro Perencanaan dan Bagian Perencanaan Pendis, tetapi masih belum ditemukan sumber anggarannya.

2) Peralatan/*equipment*
Bidding Evaluation Report (BER) telah dikirim kepada IsDB pada tanggal 24 Juni 2019. Saat ini sudah ada 2 NOL yang sudah terbit, yaitu NOL BER EQC untuk UIN Palembang dan UIN Sumatera Utara. Jika sampai Agustus NOL BER EQC untuk 2 lokasi lainnya tidak terbit maka akan berimplikasi pada terlambatnya proses *delivery* dan *installment* peralatan, terutama untuk planetarium yang pemesanannya bisa memakan waktu 6 – 8 bulan. Jika sampai akhir Juli NOL belum terbit bisa dipastikan *installment* planetarium akan terjadi setelah LDD (11 Maret 2020). Dengan demikian maka perlu dilakukan pengajuan *loan extension* yang kedua.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, PMU dan PIU sedang menyiapkan dokumen untuk mengusulkan *loan extension* yang kedua.

3) PMU *Experts*
Pekerjaan-pekerjaan PMU membutuhkan tenaga ahli terutama di bidang manajemen proyek dan *civil engineer*. *Construction expert* dan *procurement expert* yang pernah ada di PMU telah selesai masa kontraknya . Oleh karenanya PMU perlu segera mengusulkan ke IsDB terkait dengan kebutuhan adanya PMU *expert* ini.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh PMU, yaitu:
- PMU telah mengajukan TOR kepada IsDB tentang seleksi tenaga ahli dan telah disetujui oleh IsDB (mendapat NOL) pada tanggal 16 Mei 2019.
- PMU telah mengumumkan ReOI PMU *experts* hingga 3 kali dan mendapatkan peminat empat orang.
- PMU mengundang calon peserta untuk mengikuti wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019.

Realisasi pelaksanaan fisik (*civil work*) dan penyerapan anggaran dari masing-masing paket pekerjaan adalah sebagai berikut:

1) Paket 1 UIN Sumatera Utara
   - Masa laku kontrak 7 Januari 2019 – 6 Maret 2020
   - Nilai kontrak pekerjaan sipil USD 20.037.000
   - Total output kontrak adalah 7 gedung
   - Realisasi pelaksanaan fisik 41,59%
   - Realisasi penyerapan anggaran USD 7.471.000
2) Paket 2 UIN Palembang
   - Masa laku kontrak 16 Oktober 2018 – 7 Februari 2020
   - Nilai kontrak pekerjaan sipill USD 21.941.000
   - Total output kontrak adalah 9 gedung
   - Realisasi pelaksanaan fisik 57,98%
   - Realisasi penyerapan anggaran USD 10.222.000
3) Paket 3 UIN Semarang
   - Masa laku kontrak 10 Agustus 2018 – 2 Desember 2019
   - Nilai kontrak pekerjaan sipill USD 15.498.000
   - Total output kontrak adalah 8 gedung
   - Realisasi pelaksanaan fisik 80,65%
   - Realisasi penyerapan anggaran USD 7.488.000
4) Paket 4 UIN Mataram
   - Masa laku kontrak 2 Oktober 2018 – 24 Januari 2020
   - Nilai kontrak pekerjaan sipill USD 20.734.000
   - Total output kontrak adalah 9 gedung
   - Realisasi pelaksanaan fisik 76,44%
   - Realisasi penyerapan anggaran USD 8.635.000

Adapun beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari proyek *The Support to The Development of Islamic Higher Education (4 in 1)* adalah sebagai berikut:

1) Lemahnya kapasitas tim pengelola proyek (PMU) terutama dalam mempersiapkan proses pengadaan dan pemaketan barang/jasa, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek, sehingga pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan (*serious delay*).

2) Adanya penggunaan standar ganda *procurement guidelines* yang mengakibatkan dokumen tender dianggap tidak sesuai standar dokumen IDB, sehingga berakibat terhadap lamanya proses pengadaan barang/jasa.

Gambar 2.5 Dokumentasi *Site Visit* Proyek
/The Support to The Development of Islamic Higher Education (4 in 1), UIN Sumatera Utara

Patimban Port Development Project

Patimban Port Development Project merupakan proyek pinjaman luar negeri kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Proyek pembangunan pelabuhan Patimban dilakukan atas dasar Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional.

Proyek pembangunan pelabuhan Patimban meliputi pembangunan pelabuhan dengan terminal kontainer yang diperkirakan berkapasitas sebesar 7,5 juta TEUs. Perkiraan kapasitas tersebut mempertimbangkan potensi pertumbuhan *demand* di wilayah timur Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini merupakan strategi Pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan Patimban ini diharapkan juga dapat menjadi stimulator pengembangan wilayah di sekitar Subang. Skema pendanaan untuk proyek ini terdiri dari APBN dengan pinjaman luar negeri, APBD dan swasta.

Secara khusus, proyek pembangunan pelabuhan Patimban bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, dan menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.

Tabel 2.6 Data Umum Proyek Patimban *Port Development*

Nama Proyek	***Patimban Port Developmnet Project***
Instansi Pelaksana	**Kementerian Perhubungan**
Sumber Pembiayaan	**Pinjaman Jepang senilai JPY 118.906 juta**
Masa Berlaku	**13 Maret 2018 – 13 Maret 2026**

Proyek pembangunan pelabuhan Patimban terdiri dari 8 paket pekerjaan yang terbagi dalam 2 fase, yaitu fase pertama terdiri dari Paket 1, 2, 3 dan 8 yang dikerjakan oleh Kemenhub, sedangkan Paket 4 dilaksanakan oleh Kemen PUPR berupa pembangunan akses jalan. Fase kedua terdiri dari Paket 5, 6, dan 7 yang dikerjakan oleh Kemenhub.

Tahap awal fase pertama, pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter, serta terminal peti kemas 420 x 35 meter, total panjang dermaga keseluruhan adalah 4.320 meter dengan kedalaman perairan -10 m LWS. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35b hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total kapasitas tahap 1 sebesar 3,75 juta TEUs. Selanjutnya di tahap pertama fase kedua nantinya terminal kendaraan menjadi 690 meter, sedangkan terminal peti lemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x 35 meter dengan

kedalaman -14 m LWS. Lapangan peti kemas juga ditambah seluas 66 hektar dengan kapasitas 3,5 juta TEUs. Adapun kemajuan pekerjaan fisik dari setiap paket pekerjaan adalah sebagai berikut:

1) Paket 1 (Dermaga dan Reklamasi).
   Pekerjaan dalam Paket 1 meliputi pembangunan fasilitas terminal peti kemas, area tunggu truk, terminal peti kemas, terminal mobil, akses jalan, penambahan kedalaman alur dan kolam, bangunan serta fasilitas mekanis dan kelistrikan. Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: *Penta Ocean Construction*, *Toa Corporation*, *Rinkai Nissan Construction*, PT. PP (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk. Pekerjaan fisik pada paket ini sudah mencapai 20,99% dari rencana awal sebesar 25,18%, sehingga terdapat deviasi sebesar 4,19%. Deviasi tersebut dikarenakan adanya proses pemeriksaan kapal angkut material yang dicurigai oleh pihak Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANUT) Pontianak selama 2 minggu. Kondisi tersebut menyebabkan tidak beroperasinya kapal konstruksi sehingga terjadi deviasi pada capaian pekerjaan fisik. Pembangunan pelabuhan menggunakan metode *Cement Deep Mixing* (CDM) dan *Cement Pipe Mixing* (CPM). CDM merupakan proses pengecoran atau penyuntikkan semen ke dalam lapisan tanah lunak hingga didapatkan kekerasan tanah sesuai desain rencana. Selain di pelabuhan, teknik ini banyak digunakan untuk perbaikan tanah di beragam konstruksi seperti bandara, perumahan, hingga saluran air pada kondisi tanah lunak di berbagai negara di dunia. Pekerjaan CDM dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan metode CPM. Pada tahap ini, tanah hasil pengerukan dicampur dengan semen dan dipindahkan melalui pompa *pneumatic* melalui saluran pipa terapung. Tanah campuran ini diletakkan di atas lapisan CDM hingga mencapai ketinggian yang direncanakan. Penggunaan metode CDM dan CPM dalam pembangunan konstruksi merupakan hal baru di Indonesia. Metode tersebut digunakan untuk menunjang percepatan pengerjaan proyek pelabuhan Patimban. Percepatan pengerjaan proyek dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sampai saat ini, pekerjaan Paket 1 dalam tahap pengecoran dengan metode CDM dan CPM serta pemancangan *Steel*.
2) Paket 2 (*Breakwater* dan *Seawall*).
   Paket ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 3 perusahaan konstruksi dari Jepang dan Indonesia yaitu: *Toyo Construction*, *Wakachiku Construction,* dan PT. Adhi Karya (Persero). Pekerjaan yang dilakukan pada Paket 2 yaitu *preparatory works* yang terdiri dari penyelidikan tanah, inspeksi *quary* bambu dan sampel bambu serta inspeksi batu dan sampel batu. Bambu menjadi salah satu bahan yang digunakan secara permanen untuk pondasi/konstruksi karena bambu memiliki ketahanan yang kuat apabila berada di dalam air laut dan memiliki proses pelapukan yang lambat. Bambu sebagai pondasi sudah pernah diterapkan pada pekerjaan di pelabuhan lainnya. Paket 2 ditargetkan selesai pada Maret 2021.
3) Paket 3 (Jembatan Akses).
   Saat ini masih dalam tahap persiapan untuk melakukan lelang ulang. Kondisi tersebut terjadi karena pihak Kemenhub belum menemukan harga yang cocok. Kemenhub menginginkan amandemen pada *Loan Agreement* dengan melakukan perubahan terhadap Paket 3, agar *tender* dapat digunakan atau dilakukan oleh pihak dalam negeri. Saat ini Kemenhub sudah menyerahkan *Explanatory Notes* dan MoD kepada Bappenas, dan Bappenas sudah mengeluarkan rekomendasi *Eligible Nationally – on Progress*. Target Kemenhub untuk melakukan penandatanganan kontrak adalah pada Juli – Agustus 2019.
4) Paket 8 (Konsultan).
   Konsultan dalam Paket 8 ini dikerjakan oleh konsorsium yang beranggotakan 6 perusahaan yaitu: *Oriental Consultan Global Co Ltd*, *Ides Inc*, *Nippon Koei Co Ltd*, PT. Raya Konsult, PT. Rayasurverindo Tirtasarana, dan PT Indra Karya (Persero). Pembayaran uang muka sudah dilakukan pada 21 Desember 2018. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada paket ini yaitu kegiatan *Livelihood Restoration Program* (LRP). Kegiatan ini berupa pelatihan *Basic Safety Training* dan *medical check up* yang dilakukan kepada nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para nelayan juga mendapatkan pelatihan agar dapat memiliki surat ijin melaut yang digunakan untuk awak kapal besar.

Disamping kemajuan pekerjaan fisik terdapat juga beberapa isu atau permasalahan yang masih menjadi kendala dalam proyek pembangunan pelabuhan Patimban, yaitu:

1) *Port operator*.
   Dalam menentukan operator pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub dan Pemerintah Jepang telah melakukan korespondensi dan pertemuan atau kunjungan kerja secara berkala. Hasil dari korespondensi dan pertemuan tersebut adalah kesepakatan mengenai pelaksanaan operasi manajemen pelabuhan/operator pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan gabungan antara Indonesia dan Jepang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terdapat dua opsi skema lelang *port operator* yang dapat dipilih agar kesepakatan tersebut dapat terlaksana, yaitu:
   1. Menggunakan ketentuan sistem lelang barang dan jasa dengan skema KPBU atau lelang.
   2. Amandemen *Loan Agreement* dengan kewajiban operator membangun fasilitas dermaga tahap 1-2 (Pelelangan Paket 5) dan diberi hak konsesi pengoperasian pelabuhan atau pembangunan infrastruktur pelabuhan menggunakan *loan* (sisa anggaran Fase 1-1, yaitu Paket 1, 2, 3, 4, 8, dan 9) Amandemen Paket 10.

      Opsi pertama, berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan bahwa pelelangan terbuka dilakukan tidak terbatas hanya untuk investor dari perorangan atau kelompok tertentu. Sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pemilihan operator pelabuhan dengan peserta lelang terbatas hanya untuk investor dari negara tertentu. Lelang harus dilakukan secara terbuka dengan kriteria yang telah ditentukan. Tindakan yang telah dilakukan yaitu mengkhususkan kriteria lelang seperti negara yang dapat melakukan lelang *port operator* adalah negara yang mempunyai produsen mobil di Indonesia. Tetapi pihak Jepang tidak setuju dengan hal tersebut, karena negara lain juga mempunyai produsen mobil di Indonesia.

      Opsi kedua, pelaksanaannya membutuhkan proses dan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan JICA untuk menentukan amandemen *Loan Agreement* dan/atau pembuatan perjanjian/*agreement* tersendiri terpisah dari *Loan Agreement* yang sudah ada dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pembebasan lahan.
   Luas lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan pelabuhan Patimban meliputi 15,79 hektar (164 bidang) untuk jalan akses (*acces road*), dan 356,23 hektar (522 bidang) untuk sarana penunjang (*back up area*). Adapun luas lahan yang sudah berhasil dibebaskan meliputi 109.649 m^2 (121 bidang) atau sekitar 72% untuk jalan akses, dan 785.246 m^2 (486 bidang) atau sekitar 39,5% untuk sarana penunjang.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan pembangunan pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan pelabuhan Patimban telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional sesuai Perpres Nomor 47 Tahun 2016, tetapi dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi yang intensif dengan semua pihak terkait. Meskipun melalui Perpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan pelabuhan Patimban, namun dalam kenyataannya dukungan para pihak terkait baru bisa diberikan secara maksimal setelah dilakukan berbagai upaya koordinasi yang intensif.
2) Penyelesaian permasalahan proyek sangat tergantung pada kemampuan dan inovasi pelaksana proyek terutama dalam hal memilih alternatif terbaik yang paling efisien. Terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan pelabuhan Patimban, pelaksana proyek telah melakukan upaya pemilihan alternatif solusi melalui kajian dan koordinasi yang intensif dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti dengan Kementerian ATR/BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian pembebasan lahan, dan dengan LKPP serta *lender* dalam memilih opsi pengadaan *port operator*.

Gambar 2.6 Dokumentasi *Site Visit* Proyek *Patimban Port Development*

HIBAH LUAR NEGERI

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Meskipun pengelolaan hibah tidak serumit pinjaman tetapi akuntabilitasnya harus tetap dijaga, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan hibah juga dilakukan secara berkala.

Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasil pemantauan selain digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan, juga digunakan sebagai pembelajaran dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2019 berjumlah 2 (dua) proyek, yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Hibah *Community Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Grant Agreement FIP 1 "*Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project*" sudah ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2016, dengan *Grant Number* 0501-INO (EF). Kegiatan hibah ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, sejak 2017 sampai dengan 2021, dengan dana senilai USD 17,5 juta. *Executing agency* kegiatan hibah ini adalah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Adapun *implementing agency* kegiatan hibah terdiri dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

Kegiatan hibah "Investasi Khusus bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan" ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

1) Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari KPHP Kapuas Hulu, KPHP Persiapan Lot XXI, KPHK BT Kerihaun Danau Sentarum, dan 13 desa (Rantau Prapat, Nanga Nyabau, Sibau Hulu, Sibau Hilir, Banua Tengah, Sungai Uluk Palin, Tanjung Lasa, Padua Mendalam, Batu Lintang, Bunut Hulu, Nanga Tuan, Tanjung Lokang, dan Bungan Jaya).
2) Kabupaten Sintang terdiri dari KPHP Sintang/Merakai, dan 4 desa (Radin Jaya, Tanjung Sari, Kayu Dujung, Senangan Kecil).

Gambar 3.1 Lokasi Kegiatan Hibah *Community Focused Investment to Address Deforestation and Forest Degradation*

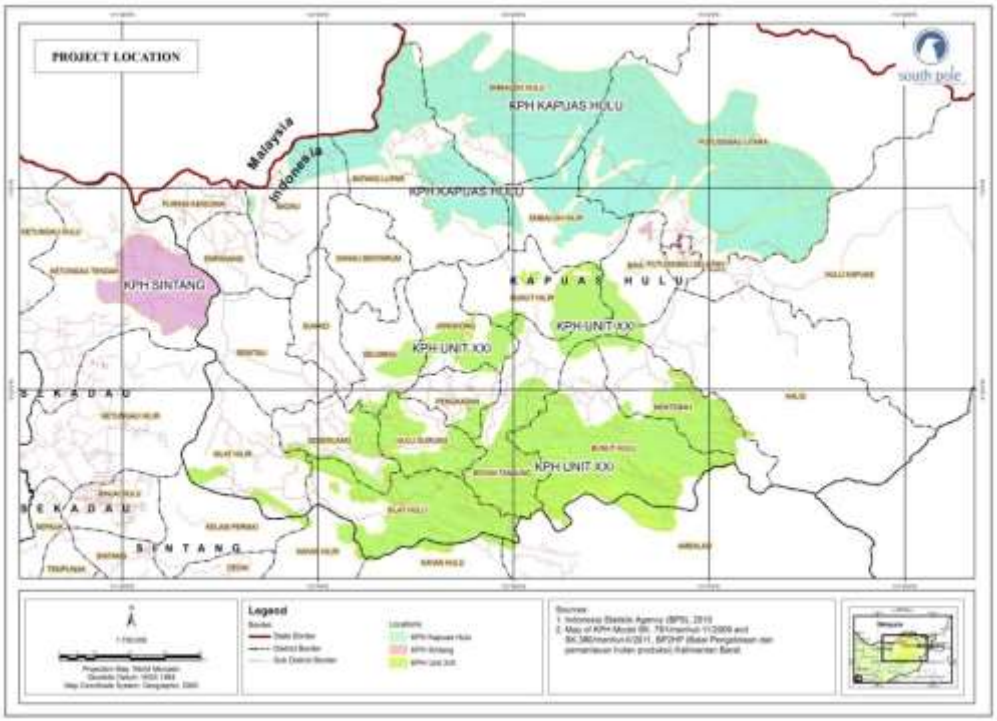

Adapun output dari kegiatan hibah "*Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project*" ini meliputi:

1) Output 1: Terlaksananya "*Community-focused and gender response REDD+ pilots*" di 17 desa, di 4 KPH di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
   a) Percepatan regenerasi alami pada lahan terdegradasi seluas 6.000 ha.
   b) Kegiatan *agroforestry* di lahan terdegradasi seluas 1.880 ha (dalam konteks PHBM).
   c) Pencegahan kebakaran seluas 5.000 ha terutama TN BT Kerihun dan danau Sentarum melalui pengelolaan masyarakat peduli api, secara tidak langsung perlindungan lahan seluas 91.000 ha melalui perbaikan sistem pemanenan madu alam, dan teknik pengeringan ikan (usaha produktif masyarakat).
   d) Kawasan hutan seluas 17.000 ha dirancang untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
   e) Dukungan terhadap kegiatan REDD+ lainnya: *Home garden*, *solar panel*, *micro hydro*, *ecotourism*, *handicrafts*, *coffee and latex processing*, dan sebagainya.
2) Output 2: Terlaksananya strategi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat secara efektif. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
   a) Penguatan kapasitas staf di tingkat provinsi terhadap pemahaman konsep-konsep REDD+, monitoring dan pelaporan REDD+, penyiapan *business plan* bagi KPH dan draf peraturan REDD+ dan perhitungan karbon.
   b) Membangun dan menghubungkan mekanisme pengaduan dan pembagian keuntungan provinsi secara luas dengan KPH dan sistem nasional.
   c) Membuat sistem informasi *safeguards* dan monitoring REDD+ di tingkat provinsi.
   d) Membentuk mekanisme penanganan keluhan pada kepemilikan dari kegiatan REDD+.
3) Output 3: Terharmonisasikannya kebijakan fiskal REDD+ daerah dengan kebijakan nasional. Kegiatan-kegiatan yang mendukung output ini adalah:
   a) Menganalisis kebijakan fiskal untuk integrasi pertimbangan sumber daya alam dalam upaya memberikan panduan kebijakan kepada pemerintah nasional dan daerah.
   b) Melakukan dialog kebijakan untuk menilai kesenjangan fiskal, kebijakan pemantauan dan pembagian keuntungan Kalimantan Barat, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk harmonisasi kebijakan yang efektif.
   c) Mengidentifikasi sumber pendanaan untuk pelaksanaan REDD+ dan pelatihan untuk mempersiapkan usulan perluasan ruang lingkup daerah dan/atau kerangka waktu proyek ini.

Meskipun pelaksanaan kegiatan hibah baru dimulai, namun tantangan atau permasalahan yang potensial menjadi penghambat sudah bisa diidentifikasi, yaitu:

a) Restrukturisasi KPH secara nasional berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, khusus Provinsi Kalimantan Barat perlu ada penetapan kembali Menteri, karena terjadi perubahan luas, bentuk terhadap SK penetapan awal. Konsekuensi: alokasi kegiatan pengembangan KPH pada direktorat KPHP dan UPT BPHP Kalimantan Barat belum dapat dilaksanakan khususnya untuk kegiatan yang terkait dengan lapangan/tapak.
b) Waktu efektif pelaksanaan proyek semakin pendek, sedangkan pelaksana proyek belum familiar dengan sistem administrasi kegiatan berbantuan hibah LN.

***Sustainable Infrastructure Assistance Program*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Hibah *Sustainable Infrastructure Assistance Program* merupakan hibah yang berasal dari Pemerintah Australia (DFAT) yang diadministrasikan melalui ADB senilai USD 17,4 juta. Hibah ini dllaksanakan sejak 17 Juni 2013 dan akan berakhir pada 30 Juni 2019. Instansi pelaksana hibah adalah Direktorat Transportasi – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengelolaan hibah ini dilakukan melalui *steering committee* yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Australia (DFAT), dan ADB.

Lingkup kegiatan dalam hibah ini terdiri dari *Technical Assistance* (TA) dan *Capacity Building* untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan infrastruktur kota lainnya (sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi, dan energi). Total TA yang berjalan adalah 9 (sembilan) TA, termasuk 3 (tiga) TA baru dan 2 (dua) TA yang sudah selesai dilaksanakan. Ketiga TA baru yang efektif di tahun 2016, yaitu:

1) TA 9116 INO: *Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway*.
2) TA 9113 INO: *Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia's Power Sector*.
3) TA 9109 INO: *Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery*.

Adapun TA yang sudah selesai dilaksanakan adalah TA 8506 INO: *Scaling up Hydro Development* dan TA 8508 INO: *IKK Water Supply Project*. TA lainnya yang sudah berjalan adalah:

1) TA 8484 INO: *Cluster Management Facility*.
2) TA 8518 INO: *Green Cities*.
3) TA 8530 INO: *Community Participation RRDP*.
4) TA 8666 INO: *MSMIP CDTA*.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan hibah ini, ADB sudah melakukan reviu dan menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada anggota *steering committee* untuk dimintakan tanggapan

Selain beberapa hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja dari masing-masing proyek. Hibah luar negeri seluruhnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2019 berjumlah 84 proyek, yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 4.343,7 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, kependudukan, pertanian, mitigasi bencana, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*). Beberapa hibah juga merupakan hibah yang menyertai pinjaman.

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

4.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Hibah Terencana					
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	46380-020	ADB	*Sustainable Infrastructure Assistance Program - Strengthening Results-Based Lending Independent Monitoring in Irrigation (Subproject 10)*	28/08/2017 - 30/06/2019	800,0
2	46380-028	ADB	*Sustainable Infrastructure Assistance Program - Preparation of the Enhanced Water Security Investment Project (Subproject 15)*	28/08/2017 - 30/06/2019	1,0
Hibah Langsung Barang/Jasa atau Surat Berharga					
Kementerian Agraria dan Tata Ruang					
1	2TR96L2A	Bank Dunia	*Impact Assessment and Technical Validation for the Acceleration Program of One Map Policy Implementation (P1060661) Project*	12/07/2018 - 31/05/2019	0,6
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi					
1	GC-1053-ID	IFAD	Program Pembangunan Desa Mandiri (VDP) - Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi RI	18/11/2008 - 31/09/2018	0,4
Kementerian Keuangan					
1	24DE98GA	IBRD	*Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund* (InIFD)	25/04/2016 - 31/12/2020	8,3
2	2UL5W29A	ADB	*Promoting Innovative Financial Inclusion* (PIFI)	18/09/2017 - 30/06/2019	0,8
3	2H816GHA	Bank Dunia	*Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* (PFM-MDTF) II	21/03/2016 – N/A	2,7
4	2Q36JPE4	UNDP	*Sustainable Development Financing*	26/09/2014 - 31/10/2020	11,0
5	N/A	UNDP	*Biodiversity Finance Initiative* (BIOFIN)	N/A	10,0
6	71484001	AIPEG	*Government Partnership Fund* (GPF) *Phase II*	N/A	5,7
7	905001	JICA	*Project for Enchancing Tax*	14/07/2014 - 30/06/2018	0,1
8	2XEF6JWA	*Global Green Growth Institute*	*Implementation of Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Programme*	20/12/2018 – N/A	0,9
9	23TSV7CA	PROSPERA	Program Kerjasama Indonesia Australia Untuk Perekonomian (Prospera)	04/12/2017 – N/A	87,2
10	N/A	Australia	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kegiatan (KOMPAK)	22/02/2019 – N/A	2.216,4
Kementerian Pertanian					
1	2HHFZ6PA	JICA	*The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System*	09/2015 – 12/2019	0,5

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
2	71465701	AusAID	*Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program (AIP-EID)*	18/01/2011 - 03/12/2018	20,7
3	29RLUFDA	*Government of New Zealand*	*Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity*	10/09/2015 - 10/09/2023	7,6
4	2CFTEZHA	FAO	*Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Treats Including Influenza A in Indonesia (OSRO/INS/501/USA)*	01/01/2016 - 30/04/2019	16,0
5	2WTVSDDA	*United Nation World Food Programme* (UN-WFP)	*Supporting Government of Indonesia to Collect and Analyse Data on Food Security and Nutrition to Optimize Policies and Programs*	28/11/2017 - 31/12/2020	1,2
6	2N942GRA	COMCEC	*Developing Agricultural Market Information System for Hortikulture Farmers*	01/06/2018 - 31/01/2019	0,1
7	2WYHAU15	UNDP	*Sustainable Palm Oil Initiative*	10/2014 - 12/2018	15,5
8	'2RT4RZUA	JICA	*Agriculture Promotion through Agritourism Utilizing the Knowledge of Roadside Stations 'Michi No Eki'*	28/06/2018 – 31/07/2021	50,9
9	72436401	FAO	*Enhanching the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (OSRO/INS/103/USA)*	01/ 2012 – N/A	16,0
10	26XV2R3A	JICA	*Project for Sixth Industrialization (Cultivation, Processing and Promotion) of Citrus Resources in Central Aceh District Utilizing Knowledge of Ochi Town*	1/11/2018 – 31/10/2021	54,1
11	71110201	Belanda	*The Indonesian-Dutch Partnership Programme Pertaining to HPAI Prevention and Control*	15/09/2006 – N/A	10,0
12	71109501	ACIAR/ Australia	*Cost-effective Biosecurity for Non-industrial Commercial Operation in Indonesia (ACIAR AH/2006/169)*	01/06/2008 - 31/05/2012	0,2
13	70857101	FAO	*Reinforcement and Expansion of the AI Participatory Disease Surveillance and Response Program in Indonesia (OSRO/INS/604/USA)*	06/2006 – 30/06/ 2013	44,2
14	2SJNWKA	Amerika Serikat	*Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centres Maros and Wates*	N/A	0,2
15	72221901	FAO	*Assistant through FAO for the control of Rabies in Indonesia (OSRO/INS/104/USA)*	27/10/2011 – N/A	0,5
16	74527101	FAO	*Assistance to the Goverment of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands (OSRO/INS/302/WPA)*	09/2013 – N/A	0,7
17	74288801	GARC	*Rabies Prevention and Eradication Program Nias*	24/09/2013 - 30/09/2017	0,3
18	2FYUT388	Kedutaan Besar Belanda	*Food Security Programme in Livestock Components*	25/07/2014 – 25/07/2017	4,7

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
19	2RPU9TFA	FAO	*Emergency Assistance to Rapidly Reduce the Increased Incidence of Rabies in Dogs and Reduce the Risk of Rabies in Human in Bali Indonesia (TCP/INS/3504)*	03/2016 – N/A	0,3
20	2S36P8TA	FAO	*Promoting Sago Starch Utilization in Indonesia (TCP/INS/3503)*	08/2015 - NA	0,3
Kementerian PPN/Bappenas					
1	71125701	USAID	*Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)*	05/01/2017 - 04/01/2020	2,0
2	2VBMBK3A	Pemerintah Australia	Program KOMPAK	14/12/2015 - 30/06/2022	141,8
3	2NNZYN8A	GAC	*Proyek NSLIC/NSELRED*	28/11/2016 – N/A	18,0
4	27MAMT9A	UNDP	*Global Sustainable Suppy Chain for Marine Commodities*	26/03/2018 - 26/12/2022	1,0
Kementerian Sekretariat Negara					
1	2SZWH4JA	Pemerintah Australia	Program Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera (MAHKOTA)	08/01/2016 - 31/12/2019	28,4
2	25MKT5DM	*Departement of Foreign Affairs and Trade Australia*	*Australia Awards in Indonesia*	03/07/2014 - 30/06/2022	117,7
Hibah Langsung/Uang					
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika					
1	164RS1QA	Natixis	*Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II - Marine Meteorology System 1*	31/07/2019 - 31/07/2025	48,3
2	N/A	AFD	*Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II - Marine Meteorology System 2*	N/A	71,1
Badan Pusat Statistika					
1	2AB9MTXA	UNFPA	UNFPA Siklus ke-9	01/01/2016 - 31/12/2020	0,3
Kementerian Pertanian					
1	2YYMH8ZA	ACIAR	*Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia*	13/06/2016 - 31/05/2020	0,4
2	2XLRA8XA	*Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)*	*Asia Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) Project in Indonesia*	01/01/2018 - 31/07/2019	1,2
3	72818801	ACIAR/ Australia	*Increasing Productivity of Allium and Solanaceous Vegetable Crops in Indonesia and Ssub-tropical Australia*	01/04/2012 - 06/2018	1,5

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
4	74680201	FAO	*Reducing Disaster Risks Caused by Changing Climate in Nusa Tenggara Timur (NTT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinces in Indonesia*	01/01/2015 - 06/2018	36,5
5	2881RS8E	ACIAR	*Integrating Herbaceous Forage Legumes into Crop and Livestock Ssystems in East Nusa Tenggara, Indonesia*	01/05/2014 - 30/04/2018	1,8
6	2W8R7VVG	ACIAR	*Improving Soil and Wwater Management and Ccrop Productivity of Dryland Aagriculture Ssystems of Aceh and NSW* (SMCN/2012/103)	01/05/2014 - 28/02/2018	1,3
7	2CGN1NA	*The University of Queensland*	*BBTV Mitigation: Community Management in Nigeria and Screening Wild Banana Progenitors for Resistance*	20/09/2017 - 30/04/2021	1,2
8	2KCWVV5A	FAO	*Multicountry Construction of A Ttest platform for the Ddevelopment and Aallocation of Globally Unique Iidentifiers for Rice Germplasm, Linking the MLS Information Infrastructure and the DivSeek*	21/06/2016 - 21/06/2019	3,6
9	29Q1X59A	FAO	*Co-development and Trasfer of Rice Technologies*	21/06/2016 - 21/06/2019	4,2
10	2HJ9J1NA	ACIAR	*Profitable Feeding Strategies for Smallholder Cattle in Indonesia*	09/01/2017 - 31/12/2020	7,1
11	2251NT3A	CIAT *and* IFPRI	*Harvest Plus Program*	20/04/2017 - 20/04/2018	0,6
12	2793QR9A	*Michigan State University* (MSU)	*Feed the Future BiTechnology Partnership*	04/05/2017 - 09/2020	2,4
13	23X88TYA	*Agricultural Science and Technology Indicator* (APAARI)	*Agricultural Science and Technology Indicators* (ASTI)	21/05/2018 - 31/12/2019	0,6
17	23ZPYAJA	*AgResearch*	*Administration of Global Research Alliance Funding by the New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre: Institutional Strengthening in South East Asia for Mitigating Livestock Methane Emissions*	11/05/18 - 30/06/21	0,3
18	2NQF4TMA	OCP S.A Morocco	*Improving Soil Fertility and Crop Production through Direct Application of Reactive Phosphate Rock*	01/2017 - 29/11/2018	2,3
19	2JNEH3FA	ACIAR	*Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscape*	01/02/2018 – 31/12/2021	0,2
20	2W8R7VVG	ACIAR	*Improving Smallholder Beef Supply and Livelihood Through Cattle-Palm System Integration in Indonesia*	01/05/2018 – 30/06/2021	275,0
21	2AJW5GTA	WU	*Shallot Track*	28/08/2018 – 31/12/2019	0,1

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
22	27RF5Q5A	NARO	*Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia*	16/11/2018 – 31/03/2023	3,6
23	27BZVLEA	ACIAR	*Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for the Indonesia, Philippine, Australia and the Asia Pacific Region*	01/07/2018 – 30/06/2023	0,4
24	27RF5Q5A	ACIAR	*Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for the Indonesia, Philippine, Australia and the Asia Pacific Region*	16/11/2018 – 31/03/2023	3,6
25	27DJAJWA	ACIAR	*Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia*	01/10/2018 – 30/06/2021	0,1
26	2VZM79KA	ACIAR	*Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia*	01/10/2018 – 30/06/2021	0,5
27	2L1HQBWA	ACIAR	*Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia*	01/10/2018 – 30/06/2021	0,1
28	2N4VZRKA	ACIAR	*Improving Cattle Production and Smallholder Livelihoods in Crop-Based Farming Systems in Indonesia*	01/10/2018 – 30/06/2021	0,2
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	2VPZQG7A	KfW	*Feasibility Study for Sewerage Development and Optimization in Greater Bandung*	07-11-16	0,9
2	66387 INJ 149	*The Government of Australia*	*Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG).*	31/07/2017 sd 30/06/2020	28,4
3	62031 INJ 149	*The Government of Australia*	*Water Hibah and Sanitation Hibah Program Phase 2*	31/07/2017 sd 30/06/2021	66,4
4	2K6Q8TSA	DFAT Australia	*The Palembang City Sewerage Project (PCSP)*	11-09-17	31,9
5	2H1GNLLA	KfW	*Feasibility Study fot the Project Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management for Selected Cities and Regencies in Indonesia*	07/11/2016 sd 30/06/19'	2,9
Kementerian PPN/Bappenas					
1	2JCK3X5Q	DANIDA	Dukungan *Environmental Support Programme Phase III* (Esp-3) Kepada *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)	12/02/2018 - 31/12/2018	0,2
2	2MFFVJHA	*Goverment of the United Kingdom of Great Britain and North Ireland* (UKCCU)	*Forest and Peatland Management to Reduce Emission In Indonesia through Local Actions*	05/04/2016 - 31/03/2019	5,3
3	25LYR55M	USAID	USAID *Support for Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)	19/06/2015 - 31/12/2019	5,0
4	2LV9UC9A	UNFPA	Program Kerjasama Programme Nine 2016-2020 (*Programme of Cooperation between the* GOI - UNFPA)	26/03/16 - 31/12/20	2,2

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
5	2H816GHA	*Multi Donor Trust Fund* (MDTF)	PFM-MDTF *Support to Indonesia Public Financial Management Reform Project*	21/03/16 - 27/03/19	0,1
6	2Y9QWFUA	Australia (DFAT)	*Australia - Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment* (MAMPU) *Phase II*	25/01/17 - 30/06/20	35,3
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	26Y2DWQA	JETRO	*International Migration of Indonesian Nurses*	21/06/2018 - 01/03/2019	1,5
2	2Z5J362A	*The National Institutes for the Humanities* Jepang	*Human-Environmental Security in Asia-Pacific Ring of fire : Water-Energy-Food Nexus*	15/008/2017 - 28/02/2018	0,1
TOTAL					**4.343,7**

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2019 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA						**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	N/A	AFD	Development of Maritime Meteorological Information System (MMS)	2019	2023	71,1	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0
2	N/A	Perancis (Natixis)	Scaling-Up BMKG Climate and Weather Service Capacity (SUS)	2019	2022	78,9	0,0	78,9	0,0	0,0	0,0
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN						**57,8**	**56,8**	**0,9**	**0,7**	**0,0**	**0,0**
	Deputi Pengewasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan										
3	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19-02-2013	31-03-2019	57,8	56,8	0,9	0,7	0,0	0,0
BADAN PENGUSAHAAN BATAM						**47,0**	**18,6**	**28,4**	**13,6**	**0,9**	**6,3**
4	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29-12-2014	30-06-2021	47,0	18,6	28,4	13,6	0,9	6,3
KEMENTERIAN AGAMA						**123,8**	**14,3**	**109,5**	**7,1**	**6,9**	**96,5**
	Ditjen Pendidikan Agama Islam										
5	IND-0164	IDB	The Support to Development of The Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18-05-2013	11-03-2020	123,8	14,3	109,5	7,1	6,9	96,5
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL						**200,0**	**0,0**	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	8897-ID	Bank Dunia	Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project)	26-10-2018	31-10-2023	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI						**518,1**	**460,9**	**57,2**	**54,9**	**0,8**	**1,4**
	Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
7	755-ID	IFAD	Village Development Programme	17-03-2009	30-06-2019	68,1	63,8	4,3	0,0	0,0	0,0
8	8217-ID	Bank Dunia	Village Innovation Project	22-03-2013	31-12-2019	450,0	397,1	52,9	54,9	0,8	1,4

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
KEMENTERIAN KESEHATAN						**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9	8873-ID	Bank Dunia	Indonesia Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) Program	09-10-2018	30-04-2024	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN						**2,5**	**1,9**	**0,6**	**0,6**	**0,4**	**64,3**
	Ditjen Binlatas										
10	IND-0159	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23-12-2013	30-06-2019	2,5	1,9	0,6	0,6	0,4	64,3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						**5.505,3**	**1.456,4**	**4.048,9**	**614,3**	**139,3**	**22,7**
	Sekretariat Jenderal										
11	3455-INO	ADB	Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Projects (ESP)	21-12-2016	30-06-2020	148,2	3,3	144,9	35,9	0,1	0,3
	Ditjen Bina Marga										
12	IDN-1012	IDB	Development of Trans South-South Java Road Project	07-11-2017	07-11-2021	15,0	0,0	15,0	2,6	0,0	0,0
13	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29-04-2013	10-06-2019	65,0	34,5	30,5	1,3	1,3	100,0
14	201542 TTL 385	RR Tiongkok	Toll Road Development of Balikpapan-Samarinda Section 5 Project	30-09-2016	30-09-2021	53,4	30,3	23,1	2,8	11,1	100,0
15	2016 1 TTL 389	RR Tiongkok	Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase II	30-09-2016	30-09-2021	219,4	120,0	99,4	24,8	21,3	85,9
	2018 14 TTL 471	RR Tiongkok	Toll Road Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) Phase III	10-09-2018	11-09-2021	130,4	0,0	130,4	21,3	0,0	0,0
16	2016 7 TTL 395	RR Tiongkok	Toll Road Development of Manado-Bitung	30-09-2016	30-09-2022	78,1	61,9	16,3	24,8	11,4	46,0

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
17	201539 TTL 382	RR Tiongkok	Toll Road Development of Solo-Kertosono Phase I Project	30-09-2016	30-09-2021	198,8	163,1	35,6	10,6	13,4	100,0
18	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12-03-2012	28-02-2021	250,0	167,8	82,2	12,4	0,2	1,5
	Ditjen Cipta Karya										
19	2010 66 471	Jerman (Kfw)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02-05-2013	31-12-2019	84,2	16,8	67,4	45,1	1,1	2,5
20	HS002 16000	Hongaria	IKK Water Supply Program and Small Water Treatment Plant for Water Scarcity Areas	01-08-2016	03-08-2020	36,4	20,8	15,6	0,0	0,0	0,0
21	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22-11-2010	31-12-2019	35,0	22,1	12,9	10,1	0,0	0,0
22	IP-565	Jepang (JICA)	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23-06-2014	23-06-2021	17,8	5,6	12,2	2,3	0,4	17,8
23	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	80,0	2,9	77,1	10,7	0,2	1,9
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09-07-2014	31-12-2020	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
24	IND-0174	IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	04-05-2021	8,0	2,2	5,8	2,7	0,0	0,0
	IND-0175	IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	09-05-2021	311,8	117,6	194,2	14,9	0,0	0,0
	IND-0176	IDB	National Slum Upgrading Project	18-09-2016	22-11-2021	10,0	0,7	9,3	0,5	0,0	0,0
	8636-ID	Bank Dunia	National Slum Upgrading Project (NSUP)	11-10-2016	22-03-2022	216,5	45,7	170,8	13,9	1,7	12,4
	LN 0004-IDN	AIIB	National Slum Upgrading Project (NSUP)	11-10-2016	22-03-2022	216,5	48,7	167,8	13,9	2,3	16,7

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
25	8717-ID	Bank Dunia	National Urban Water Supply Project (NUWSP)	28-08-2018	31-12-2022	100,0	1,0	99,0	0,0	1,0	0,0
26	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17-07-2014	31-12-2019	74,4	72,3	2,1	7,9	0,0	0,0
27	IND-0167	IDB	SANIMAS Comunity-Based Sanitation Project In Indonesia	29-10-2014	12-06-2020	100,0	70,7	29,3	26,0	0,0	0,0
28	8578-ID	Bank Dunia	Second Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Based Water Supply Project (PAMSIMAS III)	22-08-2016	31-12-2020	300,0	105,8	194,2	71,4	4,1	5,8
	Ditjen Sumber Daya Air										
29	IP-575	Jepang (JICA)	Bali Beach Conservation Project (Phase 2)	27-07-2017	27-07-2025	88,9	0,0	88,9	5,9	0,0	0,0
30	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14-02-2012	14-06-2022	98,0	47,8	50,1	18,0	0,0	0,0
31	IP-567	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23-06-2014	23-06-2021	44,7	14,1	30,6	7,5	2,1	28,5
32	8711-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II	04-08-2017	30-06-2023	125,0	13,1	111,9	23,4	1,0	4,2
	0410-IDN	AIIB	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) PHASE II	04-08-2017	30-06-2023	125,0	13,1	111,9	23,4	1,0	4,2
33	INA-22	Korea	Engineering Services for Multipurpose Dams, Rivers, and Coastal	15-02-2019	15-02-2022	31,7	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0
34	3440-INO	ADB	Flood Management in Selected River Basin	09-12-2016	31-12-2022	108,7	11,0	97,7	22,8	1,4	6,2
35	3529-INO	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	08-09-2017	30-06-2023	500,0	42,0	458,0	9,0	0,0	0,0

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
	8327-INO	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	08-09-2017	30-06-2023	100,0	8,0	92,0	8,7	0,0	0,0
36	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	08-08-2012	28-02-2019	139,6	91,1	48,5	12,7	7,3	57,4
37	IP-574	Jepang (JICA)	Komering Irrigation Project (Phase 3)	27-07-2017	27-07-2025	143,5	0,0	143,5	8,2	0,0	0,0
38	IP-573	Jepang (JICA)	Rentang Irrigation Modernization Project	27-07-2017	27-07-2026	435,4	0,0	435,4	19,1	0,0	0,0
39	8891-ID	Bank Dunia	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	23-08-2018	30-06-2024	250,0	12,0	238,0	0,0	12,0	0,0
40	IP-559	Jepang (JICA)	Upper Citarum Basin Flood Management	25-07-2013	25-07-2020	29,9	9,6	20,3	6,8	0,0	0,0
41	IP-566	Jepang (JICA)	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	23-06-2014	23-06-2021	46,1	37,1	9,1	5,1	0,9	18,6
	Ditjen Pembiayaan Perumahan										
42	8717-ID	Bank Dunia	National Affordable Housing Program (NAHP)	24-01-2018	31-03-2021	450,0	43,9	406,1	87,8	43,9	50,1
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN						**1.693,6**	**497,1**	**1.196,5**	**364,6**	**48,2**	**13,2**
	Ditjen Perhubungan Laut										
43	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01-05-2010	05-05-2019	87,6	49,9	37,7	17,4	14,0	80,5
44	IP-577	Jepang (JICA)	Patimban Port Development Project (I)	13-03-2018	13-03-2026	1.073,2	172,2	901,0	281,5	14,8	5,3
	Ditjen Perkeretaapian										
45	IP-563	Jepang (JICA)	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	23-06-2014	20-06-2021	147,3	0,0	147,3	7,0	0,0	0,0
46	EXIM PBC 411	RR Tiongkok	Procurement of Track Material and Turnout Phase II (1500 KM'SP and 500 Unit)	24-01-2017	24-01-2020	175,1	97,5	77,6	44,7	19,4	43,4

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
47	IP-508	Jepang (JICA)	Railway Electrification and Double-Double Tracking Project I	13-12-2001	11-09-2019	210,5	177,6	32,9	14,0	0,0	0,0
KEMENTERIAN PERTANIAN						**267,5**	**131,5**	**136,2**	**11,1**	**5,3**	**47,6**
	Badan Ketahanan Pangan										
48	2000001445	IFAD	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	13-02-2017	31-03-2023	98,5	1,2	97,3	10,3	0,0	0,4
49	2000001960	IFAD	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI)	08-01-2018	31-03-2023	39,9	0,9	39,0	0,8	0,9	100,0
50	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	05-07-2011	31-07-2019	49,1	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Badan Litbang Pertanian										
51	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management for Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25-10-2012	30-06-2019	80,0	80,0	0,0	0,0	4,3	0,0
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS						**63,9**	**36,2**	**27,6**	**9,1**	**0,0**	**0,0**
	Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana										
52	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	23-06-2014	23-06-2023	63,9	36,2	27,6	9,1	0,0	0,0
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI						**723,2**	**351,3**	**371,8**	**63,8**	**20,9**	**32,7**
	Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi										
53	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12-06-2013	31-12-2020	80,0	55,3	24,8	11,1	0,0	0,0
	Ditjen Pendidikan Tinggi										
54	2099 18 111	Jerman (Kfw)	Development of Teaching Hospital Hasanuddin University	01-11-2017	30-11-2022	37,3	0,7	36,6	6,6	0,7	10,2

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
55	IP-576	Jepang (JICA)	Development of World Class University with Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada	13-03-2018	13-03-2025	75,0	2,0	73,0	14,5	0,6	4,0
56	IP-541	Jepang (JICA)	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26-07-2007	25-07-2019	70,4	68,5	1,9	1,2	0,0	0,0
57	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07-02-2013	31-12-2019	75,0	72,2	2,8	13,4	12,6	93,7
58	IDN-1008	IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	06-11-2016	09-06-2021	13,9	4,8	9,1	2,2	0,8	36,4
		IDB	The Development of Four Higher Education Institutions Project	12-11-2018	22-04-2023	162,6	3,7	158,9	10,6	3,7	34,9
59	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14-04-2014	28-10-2019	174,0	126,3	47,7	3,4	2,6	76,4
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15-09-2014	31-12-2019	35,0	17,9	17,1	0,8	0,0	0,0
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA						**73,7**	**36,2**	**37,5**	**0,7**	**0,0**	**0,0**
60	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	15-07-2014	27-10-2019	36,0	35,7	0,3	0,0	0,0	0,0
61	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14-02-2012	30-09-2021	37,6	0,4	37,2	0,7	0,0	0,0
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA						**47,4**	**21,2**	**26,2**	**8,0**	**1,9**	**23,1**
62	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05-06-2014	31-12-2020	47,4	21,2	26,2	8,0	1,9	23,1
PT. PERTAMINA						**243,4**	**89,2**	**154,2**	**57,1**	**4,9**	**8,5**
63	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25-10-2011	25-10-2019	243,4	89,2	154,2	57,1	4,9	8,5
PT. PLN						**2.238,8**	**1.055,5**	**1.183,4**	**164,9**	**20,0**	**12,1**
64	IP-532	Jepang (JICA)	Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	26-06-2008	31-12-2022	249,5	10,8	238,7	47,3	0,1	0,2

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
65	IP-555	Jepang (JICA)	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31-03-2010	31-03-2019	35,1	14,2	20,9	0,1	0,0	0,0
66	IP-572	Jepang (JICA)	GDAP (Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S))	14-10-2016	14-10-2025	5,9	1,3	4,7	1,1	0,0	0,0
67	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (IPTD I)	30-05-2011	31-10-2019	205,0	177,5	27,5	4,6	0,2	5,0
68	IP-561	Jepang (JICA)	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	15,6	5,5	10,1	2,1	0,1	4,6
69	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	224,0	15,0	209,0	2,8	0,3	9,4
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29-09-2014	30-09-2019	25,0	1,6	23,4	0,3	0,0	3,3
70	IP-556	Jepang (JICA)	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26-03-2013	30-04-2022	333,9	15,4	318,5	0,1	0,0	0,0
71	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03-06-2015	03-06-2020	373,0	210,7	162,4	58,8	12,8	21,8
72	IP-538	Jepang (JICA)	Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project	29-01-2009	29-01-2021	234,8	191,0	43,8	31,6	2,2	7,0
73	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26-03-2014	31-12-2019	137,6	76,2	61,4	0,0	4,1	0,0
74	26180	Jerman (Kfw)	Scattered Transmission and Substation Project (P. 3)	05-12-2014	31-05-2019	18,9	13,3	5,6	0,0	0,0	0,0
75	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	29-04-2015	29-04-2020	241,0	218,2	22,7	0,0	0,0	0,0
76	IP-560	Jepang (JICA)	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	23-10-2013	23-10-2022	46,1	30,3	15,8	1,5	0,0	0,0
77	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01-05-2012	30-11-2020	44,0	35,6	8,4	4,6	0,0	0,0
78	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04-04-2014	30-11-2019	49,5	39,0	10,6	10,0	0,2	1,5

No	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tgl Efektif	Tgl Tutup	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2019		
									Target	Realisasi	%
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)						**400,0**	**43,9**	**356,1**	**62,4**	**20,8**	**33,3**
79	8715-ID	Bank Dunia	Additional Financing for Indonesia Infrastructure Finance Facility Project	26-09-2017	28-02-2022	200,0	20,8	179,2	22,4	20,8	92,9
80	8714-ID	Bank Dunia	Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)	25-09-2017	31-12-2020	100,0	11,6	88,4	20,0	0,0	0,0
	012-1-IDN	AIIB	Regional Infrastructure Development Fund (RIDF)	25-09-2017	31-12-2020	100,0	11,6	88,4	20,0	0,0	0,0
PEMPROV DKI JAKARTA						**1.113,5**	**878,8**	**234,7**	**143,4**	**13,6**	**9,5**
81	IP-554	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28-07-2009	28-07-2019	434,6	434,4	0,2	0,0	0,0	0,0
82	IP-571	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II	31-03-2016	31-03-2022	678,9	444,4	234,5	143,4	13,6	9,5
LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING (LPKE/KSA)						**3.426,8**	**1.935,2**	**1.491,6**	**708,3**	**201,4**	**28,4**
			Kementerian Pertahanan			2.994,4	1.845,3	1.149,1	619,5	176,9	28,6
			Kepolisian RI			432,4	89,9	342,5	88,8	24,5	27,6
TOTAL						**17.046,3**	**7.085,2**	**9.961,3**	**2.284,8**	**485,1**	**21,2**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id